



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RILPPD)

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dasar pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2023	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,12	71,13	1,44
2	Angka Kemiskinan	2,46	2,71	10,16
3	Angka Pengangguran	4,86	3,83	-21,19
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,01	2,50	24,38
5	Pendapatan Per Kapita	80.031.700.000.000	83.117.360.000,00	3,86
6	Ketimpangan Pendapatan	0,255	0,245	-3,92

Adapun untuk penjelasan secara rinci terkait dengan capaian indikator makro di atas adalah sebagai berikut :

1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

Nilai IPM Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 71,13 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yaitu sebesar 70,12 mengalami peningkatan sebesar 1,44 %. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian IPM Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 merupakan capaian tertinggi dan untuk

capaian terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2019 sebesar 69,05.

Jika dilihat dari grafik di bawah ini bahwa capaian IPM Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang positif yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat.

Grafik 1.1
Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2019-2023



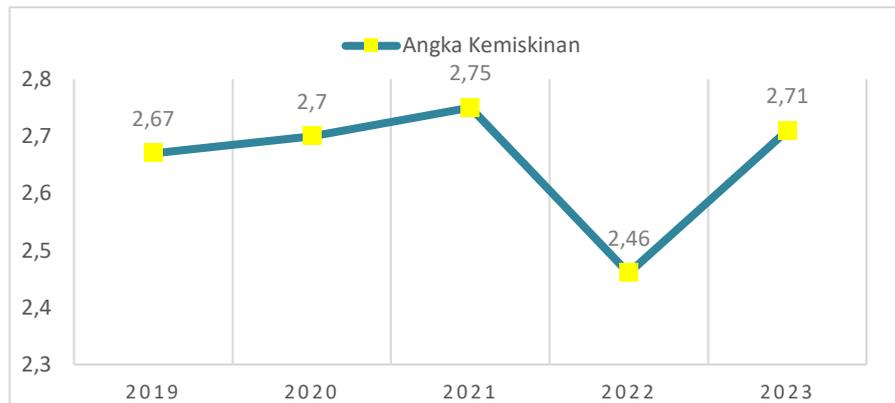
Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat, merupakan pihak-pihak memiliki tanggungjawab yang sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 2,71 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yaitu sebesar 2,46 mengalami peningkatan sebesar 10,16%. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di mana untuk capaian angka kemiskinan terendah berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,46 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 2,75.

Grafik 1.2
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat
Kurun Waktu 2019-2023



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

Jika di lihat dari grafik di atas bahwa capaian angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat fluktuatif di mana jika di lihat dari segi trend cenderung mengalami kenaikan. Capaian angka Kemiskinan di tahun 2019 hingga tahun 2021 cenderung meningkat dan kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat tajam dan kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2023.

1.3. Angka Pengangguran

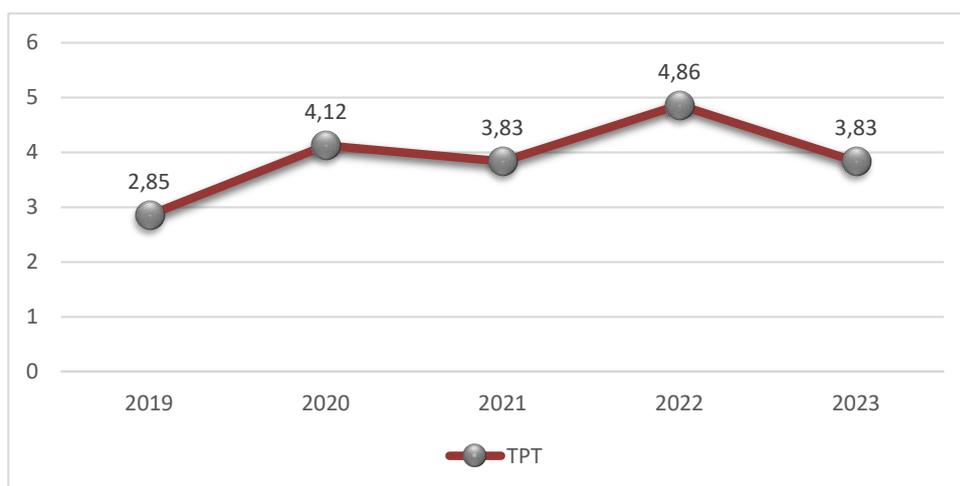
Angka pengangguran dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

TPT Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 sebesar 3,83 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yaitu sebesar 4,86 mengalami penurunan sebesar -21,19%. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian TPT Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di mana untuk capaian TPT terendah berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,85 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,86.

Grafik 1.3

Perkembangan TPT Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2019-2023



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur capaian pembangunan khususnya dibidang ekonomi, salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (rill) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.2

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (persentase)

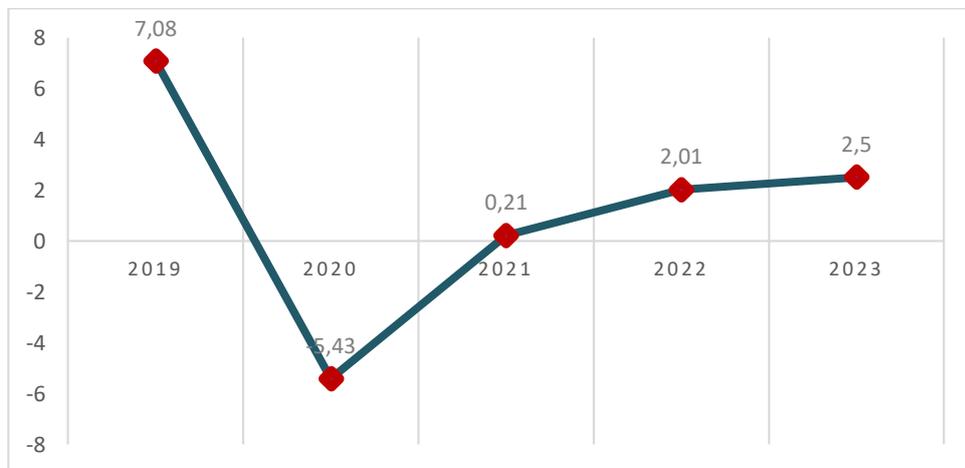
KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,10	3,53	0,01	4,13	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	1,39	-13,87	10,11	1,82	-2,99
C	Industri Pengolahan	12,46	-7,00	-4,46	-1,03	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,06	19,30	8,54	-3,58	4,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,01	7,50	3,97	3,31	0,79
F	Konstruksi	3,85	-1,46	1,71	1,87	7,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,55	-6,17	5,81	9,21	5,64
H	Transportasi dan Pergudangan	3,34	-12,99	8,29	11,35	9,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,70	-0,65	6,29	9,94	12,69
J	Informasi dan Komunikasi	12,55	18,32	5,92	8,48	12,86

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,14	-0,44	5,36	8,60	11,83
L	Real Estate	1,57	5,02	4,29	8,19	6,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,37	-9,11	4,09	8,31	5,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,08	-0,63	4,64	-0,93	7,14
P	Jasa Pendidikan	6,01	-0,77	1,86	3,04	4,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,37	1,07	9,24	2,66	4,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,48	-4,69	2,20	7,40	9,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7,06	-5,37	0,21	2,01	2,50

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2023, dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, hanya 1 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, sementara 16 kategori lapangan usaha mengalami peningkatan atau pertumbuhan yang positif dan 6 kategori lapangan usaha mengalami penurunan. Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Meningkatnya pertumbuhan tiga kategori lapangan usaha di atas disebabkan oleh adanya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi VI Bangka Belitung yang diselenggarakan di Bangka Barat beberapa waktu yang lalu sehingga berdampak kepada pertumbuhan positif ketiga sektor di atas.

Grafik 1.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat
Kurun Waktu 2019-2023



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2023 sebesar 2,50% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu sebesar 2,01% atau sebesar 24,38 point.

Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat cenderung menurun di mana untuk capaian Pertumbuhan Ekonomi terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar -5,43 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 7,08.

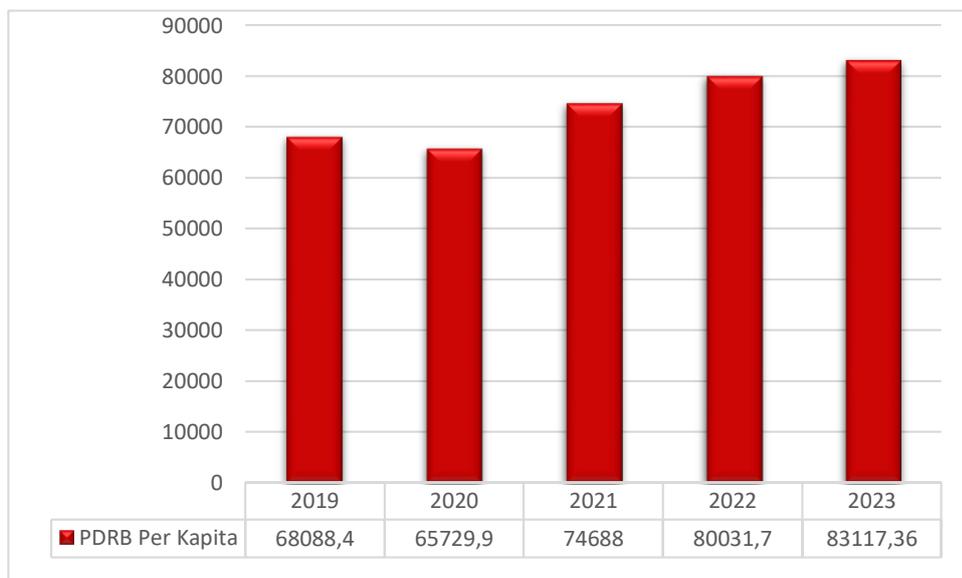
1.5. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dibandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Bangka Barat, untuk nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.83.117.360.000,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp.80.031.700.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar 3,68% di Tahun 2023. Selama 5 (enam) tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif atau terus meningkat kecuali di Tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Grafik 1.5

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2019-2023



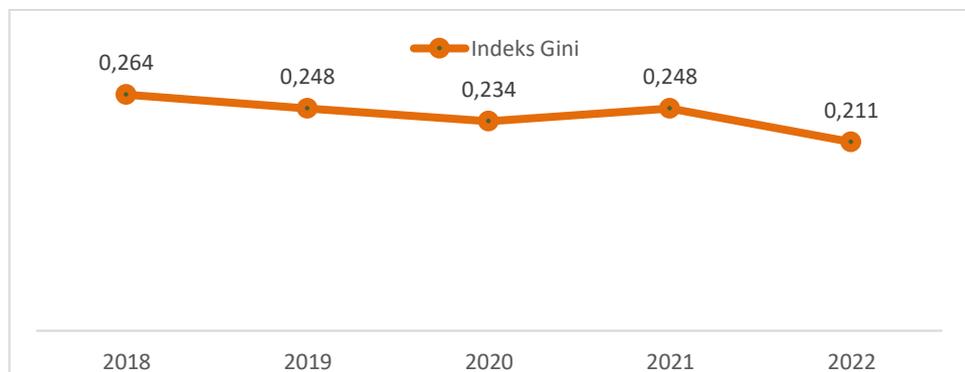
Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2024

1.6. Ketimpangan Pendapatan

Dalam pengukuran statistik, dikenal pula Indeks Gini atau *Gini Ratio* yang merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Berdasarkan konsep BPS, *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang menggunakan nilai yang berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir secara trend menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2022 Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,211 menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,248. Namun untuk indeks Gini Kabupaten Bangka Barat belum tersedia sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun yang lalu.

Grafik 1.6
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

I. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	7.132,00	95,83	6.998,00	97,48
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	7.442,00		7.179,00	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	24.914,00	98,90	26.649,00	106,65
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	25.192,00		24.987,00	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	11.212,00	90,15	11.530,00	91,28
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	12.437,00		12.632,00	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1.126,00	37,24	1.591,00	51,17

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	3.024,00		3.109,00	

b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
I	PENDIDIKAN			91.942.382.453
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.418.375.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.747.650.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	126.902.973
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.075.256.200
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	89.221.000
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	42.750.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	468.864.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru	573.234.000
			Pembangunan Ruang Guru/Ka. Sekolah/TU	835.831.148
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	174.966.786
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	458.296.460
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.265.182.585
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	1.297.038.200
			Pengadaan Mebel Sekolah	33.900.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
			Pengadaan Perlengkapan Siswa (SD)	391.385.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.025.999.474
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	16.093.340.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	23.305.258.551
			Pembangunan Laboratorium	3.674.511.400
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.728.200
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	59.423.500
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.010.300
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD	161.600.000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.071.242.800
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.003.020.000
			Penambahan Ruang Kelas Baru	573.234.000
			enambahan Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	104.196.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	161.600.000
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	891.363.400
			Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.892.921.776
			Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	662.133.700
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	135.400.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	204.650.000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	129.355.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.604.540.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12.535.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	104.466.000

c. Permasalahan yang dihadapi

////////////////////////////////////

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Pendidikan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal serta minimnya dukungan keluarga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan;
- b. Terbatasnya penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten;
- c. Belum maksimalnya penyediaan tenaga kependidikan yang dianggap belum memenuhi standar kualifikasi walaupun jika dilihat dari segi kompetensi sudah memenuhi kriteria.
- d. Belum sinkronnya serta belum dilakukan update data kependudukan dengan data di dalam DAPODIK, sehingga berdampak pada tidak validnya data jumlah siswa sekolah pada jenjang pendidikan tertentu;
- e. Belum adanya harmonisasi data antara kementerian pendidikan dengan kementerian agama untuk siswa yang bersekolah di satuan pendidikan di kewenangan masing-masing lembaga;
- f. Belum tersedianya *by name by address anak putus* sekolah yang akan di intervensi di dalam pendidikan kesetaraan.

II. BIDANG URUSAN KESEHATAN

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	212,00	0,10	244,00	0,11
		Jumlah penduduk di kabupaten/kota	209.791,00		214.428,00	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	2,00	66,67	3,00	100,00
		Jumlah RS di kabupaten/kota	3,00		3,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.439,00	100,00	3.250,00	100,00
		Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	3.439,00		3.250,00	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	3.304,00	100,00	3.291,00	100,00
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	3.304,00		3.291,00	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	3.255,00	100,00	3.254,00	100,00
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	3.255,00		3.254,00	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	11.031,00	100,00	10.873,00	100,00
		Jumlah balita di kabupaten/kota	11.031,00		10.873,00	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	36.546,00	100,00	36.522,00	100,00
		Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	36.546,00		36.522,00	
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	101.787,00	75,11	113.633,00	100,00

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
		Jumlah orang usia 15-29 tahun di kabupaten/kota	135.523,00		113.633,00	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	14.894,00	83,22	16.511,00	100,00
		Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	17.898,00		16.511,00	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43.555,00	100,00	47.040,00	100,00
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	43.555,00		47.040,00	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.098,00	100,00	4.152,00	100,00
		Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	4.098,00		4.152,00	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	487,00	100,00	503,00	100,00
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	487,00		503,00	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.266,00	100,00	3.070,00	100,00

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	2.266,00		3.070,00	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	5.432,00	100,00	5.152,00	100,00
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	5.432,00		5.152,00	

b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
II.	KESEHATAN			2.061.538.084
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	517.390.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	17.140.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	721.980.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	244.322.320
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	88.340.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	50.600.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	550.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	190.806.200

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	48.619.900
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	84.800.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	96.989.664

c. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan bidang kesehatan, baik permasalahan eksternal maupun internal antara lain yaitu:

- a. Masih terbatas tenaga medis khususnya dokter dalam melakukan pelayanan penjangkaran di masyarakat serta belum sesuai ketersediaan tenaga medis pada Puskesmas dengan intensitas pelayanan kepada masyarakat yang akan dilakukan;
- b. Masih terbatasnya program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan di masyarakat berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang melibatkan lintas sector dalam mendorong masyarakat untuk mengunjungi fasilitas Kesehatan/ posbindu/ posyandu yang ada di desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Masih ditemukan belum keseragaman dalam pengalokasian kebutuhan besaran biaya transport kader yang ada di desa ;
- d. Masih adanya kesenjangan antara luas wilayah dengan kapasitas pegawai dalam melakukan pelayanan kesehatan

III. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	129,49	57,01	129,49	57,01
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	227,14		227,14	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	38,29	30,63	2.869,00	67,00
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	124,99		4.282,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasi dan pelihara (ha)	1.001,00	38,43	1.117,00	52,54
		luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	2.605,00		2.126,00	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	47.528,00	92,19	55.790,00	92,96
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	51.555,00		60.016,00	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	49.569,00	96,15	58.624,00	97,68
		Jumlah rumah di kabupaten/ kota	51.555,00		60.016,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	33,00	100,00	2.942,00	100,00
		Jumlah IMB yang berlaku	33,00		2.942,00	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	583,69	72,12	554,79	68,55
		Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	809,31		809,31	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	279,00	50,73	309,00	56,18
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analisis di wilayah kabupaten/kota	550,00		550,00	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	59,00	100,00	100,00	100,00
		jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	59,00		100,00	

b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

1	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
---	---------	----------	--------------	-----------

1	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
III	PEKERJAAN UMUM			2.343.422.134
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kot a	1.738.841.672	1.922.190.000
			490.736.000	572.000.000
			5.540.000	5.540.000
			102.870.000	114.450.000
			1.139.695.672	1.230.200.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kot a	604.580.462	673.992.202
			16.630.100	69.775.000
			378.360.000	390.000.000
			63.885.350	67.509.800
			145.705.012	146.707.402

c. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Pekerjaan Umum tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan lahan untuk sanitasi sesuai standar;
2. Alokasi Biaya operasional serta sumber daya masyarakat sebagai kelompok pengelola yang belum optimal;

3. Belum adanya perubahan mindset masyarakat dalam mengelola air limbah dengan menggunakan SPALD;
4. Masih terbatasnya ketersediaan air baku yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air di SPAM di masing-masing wilayah;
5. Air baku disebagain di wilayah tidak tercukupi sehingga terancam ketersediaannya;
6. Banyaknya kegiatan penambangan timah yang berdampak pada kualitas air baku;
7. Belum optimalnya ketersediaan database;
8. Tidak selarasnya antara penetapan target dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki;

IV. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	67,00	100,00	15,00	100,00
		jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2019	67,00		15,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	67,00	100,00	1,00	100,00
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	67,00		1,00	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	5,79	60,82%	4,79	50,32
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	9,52		9,52	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	3468	6,93	3.039,00	6,07
		Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	50058		50.058,00	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	270,00	31,99	77,00	26,37
		Jumlah unit perumahan kabupaten/kota	844,00		292,00	

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Realisasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
IV	PERUMAHAN RAKYAT			239.056.626
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		43.670.000
			Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	17.010.000
			Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	23.260.000
			Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1.750.000
			Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1.650.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		128.501.847
			Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	66.884.779
			Pembangunan rumah bagi korban bencana	128.501.847

c. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Perumahan Rakyat tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum tersedianya dokumen kajian risiko bencana yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka barat yang secara langsung berdampak pada penetapan daerah rawan bencana;
- b. Perlu adanya sinkronisasi data hasil identifikasi lokasi rawan bencana yang telah dilakukan oleh dinas perumahan kawasan permukiman dan

- perhubungan terkait dengan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dengan dokumen kebencanaan yang telah tersedia;
- c. Perlu adanya penyempurnaan kembali terhadap dokumen hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana serta identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi.
 - d. Perlu adanya peningkatan pemahaman aparatur di dalam pelaksanaan indicator relokasi sesuai dengan tata cara yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

V. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	6,00	100,00	24,00	100,00
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	6,00		24,00	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	5,00	13,51	7,00	100,00
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	37,00		7,00	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	520,00	25,00	71.542,00	80,74

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
			2.080,00		88.610,00	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	179,00	8,61	1.635,00	66,60
			2.080,00		2.455,00	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.972,00	100,00	1.675,00	100,00
			2.972,00		1.675,00	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	7,00	77,78	10,00	100,00
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	9,00		10,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	8,02	8,02		9,06

b. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi belanja urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
	TRANTIBUMLINMAS			7.457.747.197
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		5.015.516.800
				4.942.775.800
Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan			984.598.400	
		Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		171.476.400

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
	TRANTIBUMLINMAS			7.457.747.197
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1.440.000
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	3.770.665.000
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	14.596.000
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		72.741.000
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.756.000
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	69.985.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)			1.516.668.197
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		49.598.000
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	49.598.000
		Pelayanan		1.279.676.877

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
	TRANTIBUMLINMAS			7.457.747.197
		Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	71.400.000
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	4.252.200
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	219.641.500
			Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	4.028.177
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	893.205.000
			Penyusunan rencana kontijensi	71.400.000
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	15.750.000
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	179.306.040
			Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	7.728.505
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	132.036.640
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	39.540.895
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		8.087.280
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	4.196.280
			Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	3.891.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI	
	TRANTIBUMLINMAS			7.457.747.197	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		925.562.200	
				888.357.200	
			Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	24.930.000	
			Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	246.907.600	
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	508.270.000	
			Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	99.849.600	
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8.400.000	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		0
				Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	0
			Investigasi Kejadian Kebakaran		0
				Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	0
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		37.205.000
				Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	37.205.000

c. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Masih ada kegiatan yang belum diakomodir untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal dikarenakan keterbatasan anggaran ;
- b. Belum tersedianya dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana secara menyeluruh yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi dipergunakan dalam identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana dan personil untuk mendukung pencapaian SPM di mana jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di setiap kecamatan harus ada personil Polisi Pamong Praja serta harus ada UPT Kebakaran di setiap kecamatan

VI. BIDANG URUSAN SOSIAL

a. Capaian Kinerja Outcome

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Sosial tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	10,00	100,00	19,00	100,00

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2022	% Kinerja	Capaian 2023	% Kinerja
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	10,00		19,00	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	502,00	100,00	568,00	100,00
		populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	502,00		568,00	

b. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Realisasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
	SOSIAL			1.708.258.557
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.813.585.000
			Penyediaan permakanan	1.702.588.557
			Penyediaan sandang	1.486.834.200
			Penyediaan alat bantu	15.694.500

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	REALISASI
	SOSIAL			1.708.258.557
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	53.510.000
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	2.616.273
			Pemberian layanan kedaruratan	54.596.300
			Pemberian layanan rujukan	26.010.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		5.670.000
			Penyediaan makanan	5.670.000

c. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Sosial tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada mereka di luar tugas fungsi pokoknya;
- b. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan sosial.
- c. Masih tumpang tindihnya tugas dan fungsi pekerja sosial masyarakat di lapangan yang dianggap tidak hanya melayani urusan sosial saja, sehingga berdampak pada belum optimalnya penyediaan data kesejahteraan sosial.

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

3.1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(EPPD) Tahun 2022

Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Bangka Barat berada di *posisi 104* dari 414Kabupaten yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperoleh *skor nilai sebesar 3,1430* dengan status *kinerja sedang*.

3.2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Nomor dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 85.B/S-HP/XVIII.PPG/05/2023 tentang Hasil Atas Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022, KabupatenBangka Barat mendapatkan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang berarti laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyajikan data secara wajar baik dalam hal material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyelenggarakan urusan desentralisasi yaitu 32 urusan Pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan desentralisasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan total belanjasebesar Rp.1.106.559.723.690 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.803.547.706.878, Belanja Modal sebesar Rp. 182.196.135.162, Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 3.168.738.500 dan Belanja Transfer sebesar Rp.117.647.142.150 dengan total realiasi belanja sebesar Rp.1.019.155.231.881,42 atau 92,10%, yang terdiri dari realisasi Belanja Operasisebesar Rp.738.574.160.176,49 (91,91%), realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 162.934.017.467,93, (89,43%) realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 0,00 (0%) dan realisasi Belanja Transfesebesar Rp.117.647054.237 (99,95%).

Sedangkan untuk pendapatan daerah, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 999.267.921.919,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran sebesar Rp 73.406.243.464,00, Pendapatan

Transfer dengan anggaran sebesar Rp 914.736.678.454,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan total anggaran sebesar Rp 11.125.000.000. Sedangkan total realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 ini sebesar Rp. 969.076.700.336,41 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar Rp 71.795.673.410,41 atau sebesar 97,81%, Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp 886.513.895.807,00 atau 96,91% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp 10.767.131.119,00 atau sebesar 96,78%.

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2023

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4	PENDAPATAN	999.267.921.919	969.076.700.336,41	96,98
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	73.406.243.464	71.795.673.410,41	97,81
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	29.156.787.500	26.506.009.473,00	90,91
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8.127.500.000	7.882.366.408,00	96,25
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.850.000.000	6.844.661.601,09	69,49
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.271.955.964	30.622.635.928,32	116,56
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	914.736.678.454	886.513.895.807,00	96,91
4.2.01.01	Dana Perimbangan	728.380.615.000	706.546.362.625,00	97,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi hasil (DBH)	139.653.883.000	128.046.164.913,00	91,69
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	435.286.031.000,00	434.631.148.780,00	99,85
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.585.059.000,00	47.331.879.395,00	88,33
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik	99.855.642.000,00	96.537.169.537,00	96,68
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	728.380.615.000,00	706.546.362.625,00	97,00
4.3.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	26.956.967.000,00	26.956.967.000,00	100
4.2.01.05	Dana Desa	54.434.722.000,00	54.434.722.000,00	100
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	81.391.689.000,00	81.391.689.000,00	100
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.964.374.454,00	98.575.844.182,00	93,91
4.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	69.052.810.804,00	63.044.686.182,00	91,30
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	35.911.563.650,00	35.531.158.000,00	98,94
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	104.964.374.454,00	98.575.844.182,00	93,91
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	914.736.678.454,00	886.513.895.807,00	96,91
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	11.125.000.000,00	10.767.131.119,00	96,78
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000,00	452.000.000,00	90,40
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.625.000.000	10.315.131.119,00	97,08
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.125.000,00	10.767.131.119,00	97,78
	JUMLAH PENDAPATAN	999.267.921.919,00	969.076.700.336,41	96,98

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Belanja Pendapatan Tahun 2023

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5	BELANJA DAERAH	1.106.559.723.690,00	1.019.509.455.555,42	92,13
5.1	BELANJA OPERASI	803.547.706.878,00	738.928.383.848,49	91,96
5.1.01	Belanja Pegawai	369.302.167.723,00	349.617.465.848,00	94,67
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.712.061.158,00	340.820.574.164,49	88,59
5.1.05	Belanja Hibah	45.556.047.997,00	44.841.163.570,00	98,43
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.977.430.000,00	3.649.180.236,00	91,75
	JUMLAH BELANJA OPERASI	803.547.706.878,00	738.928.383.848,49	91,96
5.2	BELANJA MODAL	182.196.135.162,00	162.934.017.467,93	89,43
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.700.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.357.947.316,00	31.054.707.102,86	93,10
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.590.771.000,00	61.751.185.849,07	90,03
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.018.630.372,00	65.901.977.241,00	90,25
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.528.786.474,00	4.226.147.275,00	93,32
	JUMLAH BELANJA MODAL	182.196.135.162,00	162.934.017.467,93	89,43
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.168.739.500,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.168.739.500,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.168.739.500,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	117.647.142.150,00	117.647.142.150,00	100
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.915.678.750,00	2.915.678.750,00	100
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	812.750.000,00	812.749.999,00	100
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.918.713.400,00	113.918.625.788,00	100
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	117.647.142.150,00	117.647.142.150,00	100
	JUMLAH BELANJA	1.106.559.723.690,00	1.019.509.455.553,42	92,13

5. Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Secara umum inovasi daerah juga dapat diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini perlu dilaksanakan karena sasaran dari inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan juga peningkatan daya saing daerah. Adapun bentuk dari inovasi daerah berupa inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi kebijakan publik, dan juga inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin. Hal tersebut senada dengan semangat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) pada pasal 31 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Sebagai pelaksana ketentuan tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat daya dukung Iptek dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa menghadapi persaingan global. Kemudian sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi menentukan tingginya daya saing suatu daerah/negara.

Untuk menjalankan prinsip prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Terkait dengan inovasi daerah ini untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki beberapa inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing Daerah. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berpartisipasi dalam inovasi daerah ini sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan daerah dalam berbagai lini sektor. Berikut disajikan berbagai inovasi daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat :

Tabel 5.1
Inovasi Daerah di Kabupaten Bangka Barat

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Judul Inovasi Daerah	Keterangan
1	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	“YANKESDU” singkatan Pelayanan Kesehatan Terpadu	Inovasi pelayanan publik yang bersifat non digital
2	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	RANTING (Ragam Intervensi Penanganan Stunting)	Inovasi pelayanan publik yang bersifat non digital
3	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Bukalapak Sukro (Puskesmas Sekar Biru)	Inovasi pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi
4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Penyampaian Laporan Bulanan Penduduk melalui google form	Inovasi pelayanan publik yang bersifat digital
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Si Jempol Panday Babar	Inovasi pelayanan publik yang bersifat digital
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sistem Informasi Digital Melayani Cuti Aparatur Sipil Negara (SIDILANCUTI ASN)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang bersifat digital dan terkait dengan digitalisasi administrasi
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Siperkasa	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang bersifat digital
8	Dinas Kesehatan	Lanjutkan Yoo	Inovasi pelayanan publik terkait dengan stabilitas keamanan dan kehidupan sosial yang bersifat digital
9	Kecamatan Mentok	Camat Rapih	Inovasi pelayanan publik terkait Smart City yang bersifat non digital
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pantasi	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang bersifat non digital

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Judul Inovasi Daerah	Keterangan
11	Kecamatan Jebus	Layanan Digital Administrasi Publik di Kecamatan Jebus (LADIMIN)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah melalui digitalisasi administrasi yang bersifat digital
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bumdesa Corners Sekolah Ubok Sekicing.	Inovasi pelayanan publik yang bersifat non digital
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	'P4GN Beraksi' (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Pemberdayaan dan Kolaborasi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terkait dengan stabilitas keamanan dan kehidupan sosial dan bersifat non digital
14	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	BEKISAH	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan bersifat non digital
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	SIPENAGUR	Inovasi pelayanan publik yang bersifat digital
16	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	NUBAR KELEKAK	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang bersifat non digital
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	KurMa BeranTu (Kurban Massal Bersama Orang Tua)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang bersifat non digital
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	AKTIVIS PELESTARI PUCUK IDAT	Inovasi pelayanan publik yang bersifat non digital

